

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

**PERWAKILAN BPKP BALI**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	610,00
		2 Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	3.237,35
		3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	203.792,64
		4 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	49.715,00
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	0,00
		2 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85,00
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0,00
		2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9,00
		3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1,00
		4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	27,00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100,00
		2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80,00
		3 Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1,00
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Prov	1,00
		2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Kab/kota	8,00
		3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Prov	1,00
		4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Kab/kota	9,00
		5 Jumlah Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	Prov	1,00
		6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Kab/kota	3,00
		7 Persentase desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	100,00
		8 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	3,00
		9 Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	90,00
		10 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	61,00
		11 Jumlah BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	BUMN	0,00
		12 Jumlah BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3	BLUD	3,00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			Satuan	Jumlah	
1		2	3	4	
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	86,00
		2	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95,00
		3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100,00
		4	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80,00
		5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	81,00
		6	Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)	Persen	100,00
		7	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	65,00
		8	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	76,00

**Program**

- 1 Pengawasan Pembangunan di Perwakilan
- 2 Pelaksanaan Dukungan Manajemen

**Anggaran**

Rp 1.848.950.000,00  
 Rp 20.437.351.000,00  
 Rp **22.286.301.000,00**

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Kepala BPKP

  
 Muhammad Yusuf Ateh  
 NIP. 19640809 198503 1 001

Kepala Perwakilan

  
 Muhammad Masykur  
 NIP. 19640227 198402 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI  
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN**

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.1.a.	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	204	-	√	-	-
2	A.1.b.	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	204	-	-	√	-
3	A.1.c.	Bantuan Operasional Sekolah	204	√	-	-	-
4	A.1.d.	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	204	-	√	-	-
5	A.1.e.	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	204	-	√	-	-
6	A.2.a.	Penanganan Covid-19 (Vaksinasi)	203	√	√	√	√
7		Penanganan Covid-19 (Pembayaran Klaim Rumah Sakit)	203	√	√	√	√
8	A.2.b.	Stunting	204	-	-	√	-
9	A.2.d.	Reformasi Sistem Kesehatan (Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes)	201	-	-	-	√
10		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Primer)	203	-	-	-	√
11		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)	203	-	-	-	√
12		Reformasi Sistem Kesehatan (Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan)	203	-	-	-	√
13	A.3.a.	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	203	√	-	-	-
14	A.3.c.	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	203	-	√	-	-
15	A.3.d.	Implementasi Bansos APBD	302	-	√	-	-
16	A.3.e.	Implementasi Bansos APBDesa	303	-	√	-	-
17	B.1.b.	Infrastruktur SPAM	103	-	-	-	√
18			405	-	-	-	√
19	B.1.c.	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	103	-	-	-	√
20	B.2.b.	Infrastruktur Jaringan Irigasi	103	-	-	√	-
21	B.3.a.	Pembangunan Jalan	103	-	-	-	√
22	B.3.b.	Pembangunan Jembatan	103	-	-	-	√
23	B.3.d.	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg)	103	-	-	-	√
24	B.3.e.	Pembangunan Bandara	103	-	-	-	√
25	B.3.f.	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	103	-	-	-	√
26	B.4.a.	Penyediaan BTS	204	-	-	√	-
27	B.4.b.	Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet	204	-	-	√	-
28	C.2.a.	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	301	√	-	-	-
29	C.2.b.	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	301	√	√	-	√
30	C.2.c.	Optimalisasi PAD	301	-	√	-	-
31	C.2.d.	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	302	-	-	√	-
32	C.2.f.	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD)	302	√	√	√	√
33	C.3.a.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Perencanaan)	303	√	-	-	-
34		Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Akuntabilitas)	303	√	√	√	√
35	C.3.b.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	303	√	-	-	-
36	C.4.a.	BUMN	401	-	-	√	-
37	D.1.a.	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	104	-	√	-	√
38	D.1.b.	Fasilitasi Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Non KUR, baik reguler maupun tambahan)	403	-	√	-	√
39	D.3.b.	Kemudahan Perizinan (OSS)	302	√	-	-	-
40	D.4.b.	P3DN (fokus pada industri Kesehatan, Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)	104	√	-	-	-
41	D.5.b.	Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19	104	-	-	-	√
42	E.1.a.	Tata Kelola Subsidi Pupuk	403	-	-	√	-


NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
43	E.1.b.	Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Pertanian)	102	-	-	√	-
44		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	302	-	-	√	-
45		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	303	-	-	√	-
46	E.1.c.	Tata Kelola Program Bibit Ternak	102	-	-	√	-
47		Tata Kelola Program Bibit Ternak	302	-	-	√	-
48		(Dana Kemendes PDTT dan APBD)	303	-	-	√	-
49	E.2.b.	Dukungan Peralatan Produksi Perikanan	102	-	-	√	-
50	E.5.a	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	401	-	-	√	-
51	F.1.a.	Reformasi Birokrasi	205	-	-	√	-
52	F.1.b.	SPIP	304	-	-	-	√
53	F.1.c.	Kapabilitas APIP	304	-	-	-	√
54	F.2.a	Pencegahan Kecurangan	501	-	√	-	-
55	F.2.b	Deteksi Kecurangan	502	-	√	-	-
56	F.2.c	Respon Kecurangan	503	-	√	-	-
57	G.2.b.	Kartu Sembako	203	-	-	√	-
58	G.2.d.	Kartu Indonesia Pintar	302	-	-	√	-
59	G.3.e.	Optimalisasi Program Padat Karya	102	-	-	√	-
60			103	-	-	√	-
61	G.3.f.	Pengembangan Potensi Desa	303	-	-	√	-

Kepala BPKP

  
**Muhammad Yusuf Ateh**  
 NIP. 19640809 198503 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Kepala Perwakilan

  
**Muhammad Masykur**  
 NIP. 19640227 198402 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI  
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH**

NO	NAMA CLUSTER	TEMA PENGAWASAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	RENDAL	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pariwisata	Pengawasan atas Pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali <i>Maritime Tourism Hub</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis desain/kebijakan atas Pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali <i>Maritime Tourism Hub</i>.</li> <li>2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Program Pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali <i>Maritime Tourism Hub</i>.</li> <li>3. Analisis capaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas Program Pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali <i>Maritime Tourism Hub</i>.</li> <li>4. Analisis kinerja Program Pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali <i>Maritime Tourism Hub</i> dihubungkan dengan konektivitas/aksesibilitas, konservasi budaya, lingkungan dan maritim, peningkatan industri pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi regional (PDRB).</li> <li>5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</li> </ol>	D 1.4				✓
2	Pariwisata	Pengawasan atas Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis desain/kebijakan atas Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, termasuk analisis keuangan (<i>financial analysis</i>) terkait dengan penggunaan sumber pembiayaan dari pinjaman daerah.</li> <li>2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Program Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung.</li> <li>3. Analisis capaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas Program Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung.</li> <li>4. Analisis kinerja Program Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung dihubungkan dengan dampak ke konservasi kekayaan budaya, peningkatan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi regional (PDRB).</li> <li>5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</li> </ol>	D 1.4				✓

Kepala BPKP  
  
 Muhammad Yusuf Ateh  
 NIP. 19640809 198503 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021  
 Kepala Perwakilan  
  
 Muhammad Masykur  
 NIP. 19640227 198402 1 001